



**ANALISIS PERAN AKTOR DALAM KEBIJAKAN KEMANDIRIAN  
PETANI KONSERVASI LAHAN MELALUI PROGRAM *FLOOD  
MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASINS (FMSRB)***

<sup>1</sup>Agus Lukman Hakim, <sup>2</sup>Pryo Handoko, <sup>3</sup>Arif Nugoroho, <sup>4</sup>Natta Sanjaya,  
<sup>5</sup>Ade Hadiono, <sup>6</sup>Ipah Mulyani, <sup>7</sup>Nasir, <sup>8</sup>Siti Aina Firdaus  
<sup>1234568</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten  
<sup>7</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya  
<sup>1</sup>aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id, <sup>2</sup>pryo.handoko@stiabanten.ac.id

---

**ABSTRACT**

This study analyzes the role of actors in farmer institutional strengthening policies as an implementation of the Flood Management In Selected River Basins (FMSRB) Program that has been accompanied and fosters independence in funding farmer groups. The informants of this research were all farmer groups who received benefits from the Community Driven Development (CDD) program in the Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices for Flood Management in Selected River Basins Sector Project – FMSAP FMSRB Pandeglang Regency as well as policy stakeholders and competent experts in the program with a total of 22 people. Data analysis using Stakeholder Analysis. Based on stakeholder analysis, it was found that first, the main actor is the farmer group as the beneficiary, the relationship and influence are very strong because as the object of the beneficiary The secondary stakeholders are academics, mass media, private sector, consultants, CF (Facilitator), Extension (PPL), Communities are affected indirectly, with the actors most playing a role being private actors. Key stakeholder groups include donor agencies, the Asian Development Bank; the ministry of agriculture and related ministries such as the Environment; Local Government of Pandeglang Regency, especially the Department of Agriculture and Food Security; Regional Development Planning Agency; Regional Financial Revenue and Assets Agency; Environmental Agency; Regional Disaster Management Agency; Department of Public Works and Spatial Planning. The initiator and catalyst actors in the sustainability of the program are highly dependent on the Regional Government of Pandeglang Regency, especially the Department of Agriculture and Food Security. Second, the pattern of Sustainability and Development of FMSRB is expected to be initiated by the Pandeglang Regency Agriculture and Food Security Office by involving various agencies and community groups concerned with land conservation efforts.

---

**Keywords;** Actors, Policy, FMSRB, Pandeglang Regency

---

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu fenomena tahunan di daerah aliran sungai (DAS) Cidanau-Ciujung-Cidurian (3C) yang membahayakan adalah erosi dan banjir. Degradasi DAS disebabkan karena lemahnya manajemen usaha tani dan penggundulan hutan

menyebabkan tingginya aliran air permukaan dan peningkatan sedimentasi saat musim hujan. Hal ini menuntut adanya perbaikan implementasi praktek bertani dan pemeliharaan hutan serta konservasi tanah dan air. Upaya dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko banjir.

Sungai Ciujung yang berada di wilayah Provinsi Banten, merupakan salah satu sungai di Pulau Jawa yang daerah aliran sungai (DAS) yang tergolong kritis, dengan rasio debit air sungai maksimum ( $Q_{maks}$ ), dan minimum ( $Q_{min}$ ) 1.880. Debit maksimum air sungai Ciujung tersebut 1.880 m<sup>3</sup>/detik, dan debit minimum 1 m<sup>3</sup>/detik (Kurnia et. al., 2011). Ini menunjukkan bahwa pada musim hujan, volume air sungai sangat besar dan sering menyebabkan banjir di wilayah yang dilalui sungai tersebut serta menimbulkan genangan di bagian hilir DAS. Di saat kemarau, sungai tersebut berkurang airnya (kering). Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah DAS tersebut sudah tidak bisa lagi mengkonservasi air dengan baik. Bersamaan dengan banjir, terjadi pendangkalan sungai dan sedimentasi di bagian hilir DAS, sehingga akan mengurangi kapasitas tampung sungai tersebut.

Pada sisi lain, di bagian hilir DAS Ciujung yang melewati Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, terjadi pertambahan jumlah penduduk karena kebutuhan perumahan dan pemukiman, perluasan kota, pabrik dan usaha/jasa lainnya memicu terjadinya peningkatan volume aliran permukaan karena luas permukaan tanah yang kedap air bertambah luas. Hal ini akan memicu peningkatan aliran permukaan dan menyebabkan banjir pada musim penghujan.

Pengendalian banjir dan erosi dibutuhkan dengan berpegang pada prinsip menunda terjadinya aliran permukaan, memperbesar atau meningkatkan kapasitas tanahnya dalam meresapkan air, dan mengurangi terjadinya pengikisan atau penghancuran permukaan tanah oleh erosi air hujan. Penanaman pohon-pohonan bernilai ekonomis dan/atau multi guna, embung-embung kecil (small ponds) adalah teknik konservasi tanah dan air yang dapat mencegah terjadinya erosi, dan mengurangi laju aliran permukaan. Selain itu, penggunaan varietas tanaman unggul dan pohon-pohonan yang bernilai ekonomis, serta perbaikan cara-cara berusahatani merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian juga dengan integrasi pemeliharaan ternak dan penggunaan tanaman pakan yang berkualitas dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki tingkat kesuburan tanahnya sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan. Selain konversi lahan pertanian, dibagian hulu DAS Ciujung mengalami kekritisian dengan meluasnya

lahan kritis DAS. Pada tahun 2018 terdapat 330.407 hektar lahan kritis di Provinsi Banten dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2013 jumlah lahan kritis di Provinsi Banten seluas 36.955 hektar (BPS, 2022) sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi Banten (Hektar)**

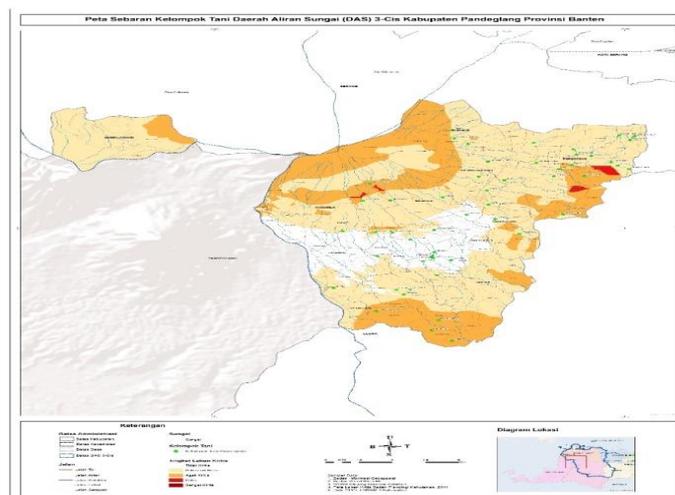
Kritis			Sangat Kritis			Jumlah		
2011	2013	2018	2011	2013	2018	2011	2013	2018
56.753	33.239	236.325	10.750	3.716	94.083	67.503	36.955	330.407

(Sumber: BPS, 2022)

Dari jumlah lahan kritis di Provinsi Banten, pada umumnya luas lahan kritis paling banyak terdapat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Lahan kritis di Kabupaten Lebak tahun 2020 mencapai 133.400,49 hektar dan lahan kritis di Kabupaten Pandeglang seluas 69.688,10 hektar (Ulum, 2020). Ratusan ribu hektar lahan yang dinyatakan kritis tersebut terjadi akibat tidak seimbangnya penebangan pohon dengan penanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Lahan kritis seluas itu sebagian besar, yakni 70 persen ada di hutan produksi dan 30 persen terjadi di hutan negara (Ulum, 2020).

Lahan kritis di Kabupaten Pandeglang tersebar di beberapa titik lokasi salah satunya di Kecamatan Kaduhejo, Majasari, dan Karang Tanjung. Jika diperhatikan pada gambar peta wilayah lahan kritis di Kabupaten Pandeglang ditandai dengan daerah yang berwarna merah. Namun demikian, sebagian besar wilayah di Kabupaten Pandeglang memiliki lahan agak kritis dan potensial kritis, gambar 1.

**Gambar 1. Peta Lahan Kritis Kabupaten Pandeglang**



(Sumber: DPKP, 2022)

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa adanya lahan kritis di Kabupaten Pandeglang membutuhkan upaya konservasi lahan dalam bentuk rehabilitasi lahan. Lahan yang termasuk kategori agak kritis dan potensial kritis yang ditunjukkan dengan daerah yang berwarna coklat muda dan coklat tua sebagai daerah yang cakupannya cukup luas membutuhkan konservasi lahan dalam bentuk pengendalian.

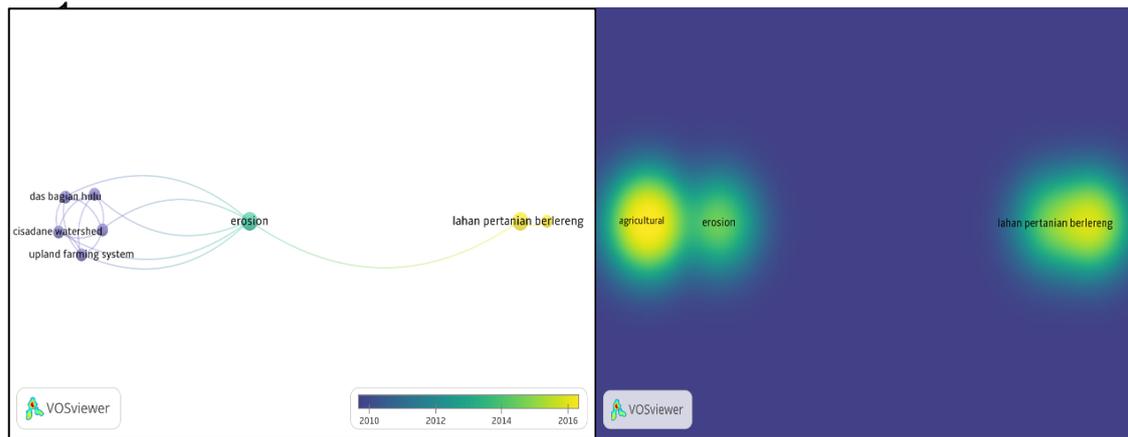
Permasalahan lain dalam pengelolaan DAS Ciujung, masyarakat petani yang ada di daerah hulu sungai atau sekitar lereng pegunungan adalah budidaya lahan pertanian di kawasan non-hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi, seperti masyarakat lebih senang bercocok tanam hortikultura pada daerah lahan kritis ketimbang tanaman keras, karena pada umumnya para petani lebih mementingkan nilai ekonomis dari hasil tani dengan alasan waktu panen yang pendek dibandingkan menanam tanaman keras seperti cengkeh, durian, kopi, dan tanaman keras lainnya yang memiliki umur panen yang cukup lama.

Kajian ini merupakan salah satu upaya menganalisis peran aktor dalam kebijakan penguatan kelembagaan petani sebagai pelaksanaan dari Program *Flood Management In Selected River Basins (FMSRB)* yang telah didampingi serta menumbuhkan kemandirian dalam pendanaan kelompok tani sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan pola pengelolaan DAS yang telah diterapkan dengan pendekatan *Community Driven Development (CDD)*.

Adapun rumusan masalah siapa sajakah para pihak (*stakeholders* kunci) yang berperan dalam keberlanjutan pengelolaan konservasi lahan serta apa saja komitmen dan potensial dukungan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan kawasan konservasi mandiri? Bagaimanakah bentuk-bentuk pendanaan berkelanjutan pengelolaan konservasi lahan dan langkah-langkah strategis apa sajakah untuk merealisasikan pendanaan tersebut?

Adapun kajian ini bertujuan untuk menganalisis pihak (*stakeholders*) yang berperan dan berpengaruh dalam keberlanjutan pengelolaan konservasi lahan dan optimasi lahan serta mengidentifikasi komitmen dan potensial dukungan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan kawasan konservasi mandiri. Selain itu, merekomendasikan bentuk-bentuk pendanaan berkelanjutan pengelolaan konservasi lahan dan optimasi lahan dan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan pendanaan tersebut.

Secara periode kajian dengan tema petani konservasi lahan sudah ada beberapa yang meneliti pada rentang tahun 2010 sampai tahun 2016 sebagaimana Gambar 2.

**Gambar 2. Positioning Topic Riset**

(Sumber: data sekunder, diolah 2022)

Dari hasil pemetaan terlihat bahwa kajian penelitian tentang kemandirian petani konservasi lahan sedikit diteliti dari tahun 2010 s/d 2016, untuk tahun 2016 s/d 2022 belum ada lagi penelitian yang meneliti dengan tema dimaksud. Walaupun demikian, untuk penelitian dengan tema Erosi Lahan Pertanian sudah ada beberapa penelitian terlihat dari warna kuning yang mencolok dari hasil pemetaan yang menunjukkan semakin terangnya warna dan semakin besarnya ukuran, maka menunjukkan tema tersebut sudah banyak diteliti.

Salah satu penelitian serupa dari hasil pemetaan menggunakan aplikasi Publish or Perish adalah penelitian (Rusdiyana, Nurwahyunani, & Marianti, 2021) dengan judul Analisis Peran Petani Dalam Konservasi Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. Selanjutnya penelitian (Sutrisno, Balitklimat, & Heryani, 2014) dengan judul Teknologi Konservasi Tanah dan Air untuk Mencegah Degradasi Lahan Pertanian Berlereng. Penelitian serupa lainnya yaitu (Damara, 2017) dengan judul Konservasi Lahan Pertanian Di Desa Wonolelo Dan Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Selanjutnya penelitian (Wijayanto, Wibowo, & Anantayu, 2021) dengan judul Perilaku Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Kawasan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Kabupaten Karanganyar.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu tersebut dengan tema yang serupa memang sudah ada beberapa yang mengkajinya, namun untuk penelitian dengan judul exit strategi kemandirian petani konservasi lahan program FMSRB belum ada yang pernah meneliti sama sekali apalagi di lokasi penelitian DAS Ciujung-Cidurian-Cisadane.

## B. METODE

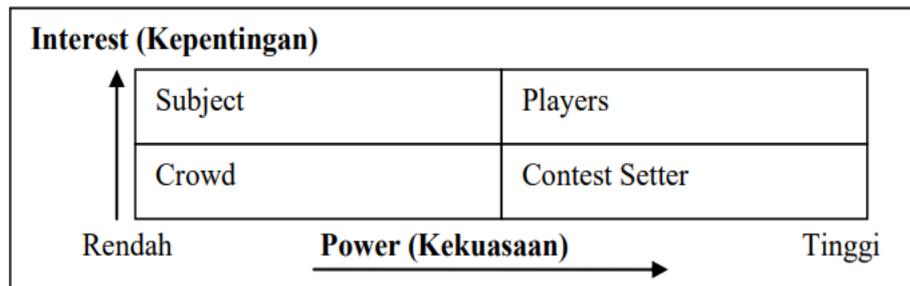
Berdasarkan tujuannya Penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran cermat atas fenomena sosial tertentu, tanpa melakukan pengujian hipotesa atau menjelaskan hubungan kausal antar variable. Salah satu kegunaannya adalah untuk evaluasi (Singarimbun, 2008). Adapun Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah pada Kabupaten Pandeglang, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Cadasari, Karang Tanjung, Majasari, Kaduhejo, Mandalawangi, dan Pandeglang. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung pada bulan 01 Agustus hingga 31 Oktober 2022.

Informan penelitian ini adalah seluruh kelompok tani yang menerima merasakan manfaat program Community Driven Development (CDD) dalam program *Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices for Flood Management in Selected River Basins Sector Project* – FMSAP FMSRB Kabupaten Pandeglang serta *stakeholder* kebijakan dan para pakar yang kompeten pada program tersebut.

Pada penelitian ini, populasi tidak bisa terdata sehingga sampel tidak bisa ditampilkan dengan metode penarikan sampel. oleh karena itu teknik pengambilan sample dengan purposive sampling sebesar 22 informan. Adapun informan penelitian yang digunakan dalam analisis kualitatif adalah kelompok tani penerima manfaat program *Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices for Flood Management in Selected River Basins Sector Project* – FMSAP Kabupaten Pandeglang serta *stakeholder* kebijakan dan para pakar yang kompeten pada program tersebut (instansi pemerintah, Akademisi, pelaku usaha, akademisi, penyuluh serta masyarakat).

Dalam menganalisis data dengan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan Analisis *Stakeholder*. Analisis *stakeholder* digunakan untuk memotret aktor yang terlibat/pengangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan publik serta menganalisis tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam kebijakan tersebut. Analisis *stakeholder* dimulai dengan menyusun pada matrik dua kali dua pada matrix menurut *interest* (kepentingan) *stakeholder* pada suatu masalah dan kekuasaan (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah (Brysson, 2004). *Interest* adalah kepentingan yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan *power* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan.

**Gambar 3. Analisis Stakeholder**



(Sumber: Brysson, John M, 2004)

Penjelasan Gambar sebagai berikut:

1. *Contest Setter*, yaitu *stakeholder* yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tetapi sedikit kepentingan.
2. *Players*, yaitu *stakeholder* yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. *Stakeholder* ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengembangan kebijakan.
3. *Subject*, yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang rendah. Mereka mendukung kegiatan walaupun pengaruhnya kecil.
4. *Crowd*, yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuesioner analisis *stakeholder* diperoleh analisis hasil penelitian sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi *stakeholder*

Adapun *stakeholder* yang terkait dengan program FMSRB adalah sebagai berikut:

- a. *Stakeholder* utama, yaitu adalah *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan keberlangsungan dan keberlanjutan suatu kebijakan, program, dan proyek. *Stakeholder* utama dalam program FMSRB ini adalah Kelompok tani yang utama selaku penerima manfaat, hubungannya sangat kuat karena selaku objek penerima manfaat.
- b. *Stakeholder* Sekunder adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap keberlangsungan suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam

*stakeholder* ini adalah Akademisi, Media massa, swasta, konsultan, CF (Fasilitator), Penyuluh (PPL), masyarakat yang terkena dampak secara tidak langsung.

- c. *Stakeholder* kunci adalah *Stakeholder* yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan keberlangsungan program FMSRB *Stakeholder* yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan keberlangsungan program FMSRB. Adapun kelompok yang termasuk dalam *stakeholder* kunci adalah lembaga donor, kementerian pertanian dan kementerian terkait seperti Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, PUPR.

## 2. Tingkat keterlibatan *Stakeholder*, kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder* dalam keberlangsungan program FMSRB

Berdasarkan analisis *stakeholder* ditemukan keterlibatan, kepentingan, sumberdaya serta pengaruh *stakeholder* pada keberlangsungan program FMSRB, sesuai tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Matrik Peran, Kepentingan, Sumberdaya dan Pengaruh Aktor dalam Keberlangsungan FMSRB**

JENIS <i>STAKEHOLDER</i>	PERAN DALAM KEBIJAKAN FMSRB	KEPENTINGAN	SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	PENGARUH
<b>STAKEHOLDER UTAMA</b>				
Kelompok Tani	Pelaku Kebijakan dan dampak kebijakan	Pendapatan	Lahan dan SDM	Sangat besar
<b>STAKEHOLDER SEKUNDER (PENDUKUNG)</b>				
Media	Pengamat Kebijakan	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	Memiliki keahlian/Kompetensi	Cukup berpengaruh
Akademisi	Pengamat Kebijakan	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	Memiliki keahlian/Kompetensi,	Cukup berpengaruh
Swasta	Pelaku Kebijakan	Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	Memiliki anggaran dan SDM	Berpengaruh besar
LSM	Penghambat Kebijakan	Peningkatan pemahaman dan kompetensi	Memiliki keahlian/Kompetensi	Sedikit Berpengaruh

JENIS STAKEHOLDER	PERAN DALAM KEBIJAKAN FMSRB	KEPENTINGAN	SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	PENGARUH
		masyarakat/Kelompok tani		
Konsultan	Pelaku kebijakan	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani dan Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan.	Memiliki keahlian/Kompetensi	Berpengaruh Besar
CF ( <i>fasilitator</i> )	Pelaku kebijakan	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	Memiliki keahlian/Kompetensi	Berpengaruh Besar
PPL ( <i>penyuluh</i> )	Pelaku kebijakan	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	Memiliki keahlian/Kompetensi	Berpengaruh Besar
Masyarakat	Yang terkena imbas kebijakan	Konservasi lahan dan Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	memiliki lahan	Cukup Berpengaruh
<b>STAKEHOLDER KUNCI</b>				
Lembaga Donor	Pembuat Kebijakan dan Pelaku Kebijakan	Konservasi lahan	Memiliki anggaran dan SDM	Sangat Berpengaruh
Kementerian	Pembuat Kebijakan dan Pelaku Kebijakan	Konservasi lahan & Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	Memiliki anggaran dan SDM	Berpengaruh Besar
Pemerintah Daerah Kab Pandeglang	Pembuat Kebijakan dan Pelaku Kebijakan	Konservasi lahan & Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	Memiliki anggaran dan SDM	Berpengaruh Besar

(Sumber: hasil wawancara, 2022)

Keterangan:

- 1) Peran dalam FMSRB: Pembuat Kebijakan, Pelaku Kebijakan, Yang terkena imbas kebijakan, Penghambat Kebijakan.
- 2) Kepentingan: Konservasi lahan, Pendapatan Keluarga, Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani, Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan.

- 3) Sumber daya yang dimiliki: Memiliki anggaran dan SDM, Memiliki keahlian/Kompetensi, memiliki lahan
- 4) Kriteria Pengaruh: Tidak Berpengaruh, Sedikit Berpengaruh, Cukup Berpengaruh, Berpengaruh Besar, Sangat Berpengaruh.

### 3. Analisis Kepentingan dan Pengaruh Aktor Dalam Keberlangsungan FMSRB

Analisis ini dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut Interest (minat)/kepentingan *stakeholder* terhadap salah satu masalah dan Power (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut (Bryson,2003). Keberhasilan suatu program yang melibatkan *stakeholder* lain tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. Interest/minat adalah minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap pembuatan dan perumusan implementasi kebijakan Keberlangsungan FMSRB. Sedangkan yang dimaksud dengan Power adalah: Kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembuatan dan perumusan implementasi kebijakan keberlangsungan FMSRB.

**Tabel 3. Analisis Kepentingan dan Pengaruh Aktor Dalam Keberlangsungan FMSRB**

JENIS <i>STAKEHOLDER</i>	KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM FMSRB	EFEK (-/0/+)	TK KEPENTINGAN	PENGARUH
<b>STAKEHOLDER UTAMA</b>				
Kelompok Tani	Konservasi lahan dan Pendapatan Keluarga	+	Kritikal	Sangat Berpengaruh
<b>STAKEHOLDER SEKUNDER (PENDUKUNG)</b>				
Media	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	0	Sedikit Penting	Cukup Berpengaruh
Akademisi	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	+	Sedikit Penting	Cukup Berpengaruh
Swasta	Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	+	Sangat Penting	Berpengaruh Besar/Signifikan
LSM	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	-	Tidak Penting	Berpengaruh Besar/Signifikan

JENIS STAKEHOLDER	KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM FMSRB	EFEK (-/0/+)	TK KEPENTINGAN	PENGARUH
Konsultan	Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	+	Sangat Penting	Cukup Berpengaruh
CF ( <i>fasilitator</i> )	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	+	Sangat Penting	Berpengaruh Besar/Signifikan
PPL ( <i>penyuluh</i> )	Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani	+	Penting	Berpengaruh Besar/Signifikan
Masyarakat	Pendapatan Keluarga	0	Penting	Sangat Berpengaruh
<b>STAKEHOLDER KUNCI</b>				
Lembaga Donor	Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	+	Kritikal	Sangat Berpengaruh
Kementerian	Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	+	Kritikal	Sangat Berpengaruh
Pemerintah Daerah Kab Pandeglang	Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan	+	Sangat Penting	Sangat Berpengaruh

(Sumber: Wawancara, 2022)

**Keterangan:**

- Kepentingan: Konservasi lahan, Pendapatan Keluarga, Peningkatan pemahaman dan kompetensi masyarakat/Kelompok tani, Kesesuaian Program dengan output yang diharapkan.
- Efek: Negatif (-), tidak ada efek (0), efek positif
- Tingkat kepentingan *stakeholder* dalam FMSRB:  
U: Tidak Diketahui, 1: Tidak Penting, 2: Sedikit Penting, 3: Penting, 4: Sangat Penting, 5: Kritikal
- Pengaruh *Stakeholder* dalam Program FMSRB:  
U: Tidak diketahui, 1: Tidak Berpengaruh, 2: Sedikit Berpengaruh, 3: Cukup Berpengaruh, 4: Berpengaruh Besar/Signifikan, 5: Sangat Berpengaruh

**Pembahasan Hasil Analisis Stakeholder**

Berdasarkan analisis *stakeholder mapping* sangat terlihat aktor utama, aktor sekunder dan aktor kunci terkait keberlangsungan program FMSRB. Pada aktor utama terpotret bahwa Kelompok tani selaku penerima manfaat, hubungan dan pengaruh sangat kuat karena selaku objek penerima manfaat. Kelompok tani memiliki sumberdaya lahan dan kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan lahan pertanian. Pada kemampuan sumberdaya tersebut, kelompok tani memiliki kepentingan yang besar terkait peningkatan pendapatan. Sisi ini tentu kita bisa maknai positif dan negative. Pada sisi positif, jika program

FMSRB memberikan pendapatan jangka pendek dan harapan pendapatan jangka panjang maka aktor kunci, yaitu petani akan menjadi penopang besar dalam pengembangan kegiatan FMSRB. Sebaliknya, jika program FMSRB dalam jangka pendek dirasakan belum memiliki dampak langsung secara pendapatan dan harapan rendah dalam menopang pendapatan maka dukungan program pengembangan FMSRB makin rendah. Salah satu tantangan besar konversi lahan pertanian adalah karena disebabkan oleh faktor ekonomi Kelompok tani/petani, yang memaksa kelompok tani/petani menjual lahan pertaniannya, walaupun berakibat kehilangan sumber mata pencahariannya.

Pola konversi lahan yang telah berhasil di Indonesia adalah dengan memadukan pendekatan konservasi lahan dengan pengembangan ekonomi petani. Rusdiyana (2021) menjelaskan bahwa Petani memiliki peran penting dalam konservasi lahan untuk mengembalikan fungsi lahan kritis menjadi lahan potensial. Beberapa konservasi lahan yang berhasil dengan pola kearifan lokal di Indonesia seperti di petani Baduy di Banten, petani Desa Hutan Gurgur kecamatan Silaen kabupaten Toba Samosir, petani di Kemiren Banyuwangi, petani di Solo dan Petani di kampung Malaris Pegunungan Maratus Kalimantan Selatan. Pola konservasi Petani tradisional di Indonesia untuk menjaga produktivitas lahan pertanian dan mencegah degradasi lahan adalah dengan melakukan konservasi lahan dengan baik, antara lain penanaman tanaman vegetasi, bijak menggunakan pupuk buatan, identifikasi karakter lahan sebagai langkah awal sebelum menentukan jenis tanaman budidaya.

Pada *stakeholder* sekunder, Kelompok masyarakat yang termasuk dalam *stakeholder* ini adalah Akademisi, Media massa, swasta, konsultan, CF (Fasilitator), Penyuluh (PPL), masyarakat yang terkena dampak secara tidak langsung. Pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori *stakeholder* sekunder ada aktor yang sangat berpengaruh besar dibandingkan aktor lainnya adalah keberadaan aktor swasta.

Adapun kelompok yang termasuk dalam *stakeholder* kunci adalah lembaga donor, yaitu *Asian Development Bank* (ADB); kementerian pertanian dan kementerian terkait seperti Lingkungan Hidup; Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas PUPR. Berdasarkan analisis *stakeholder*, lembaga yang menjadi inisiator dan katalisator dalam

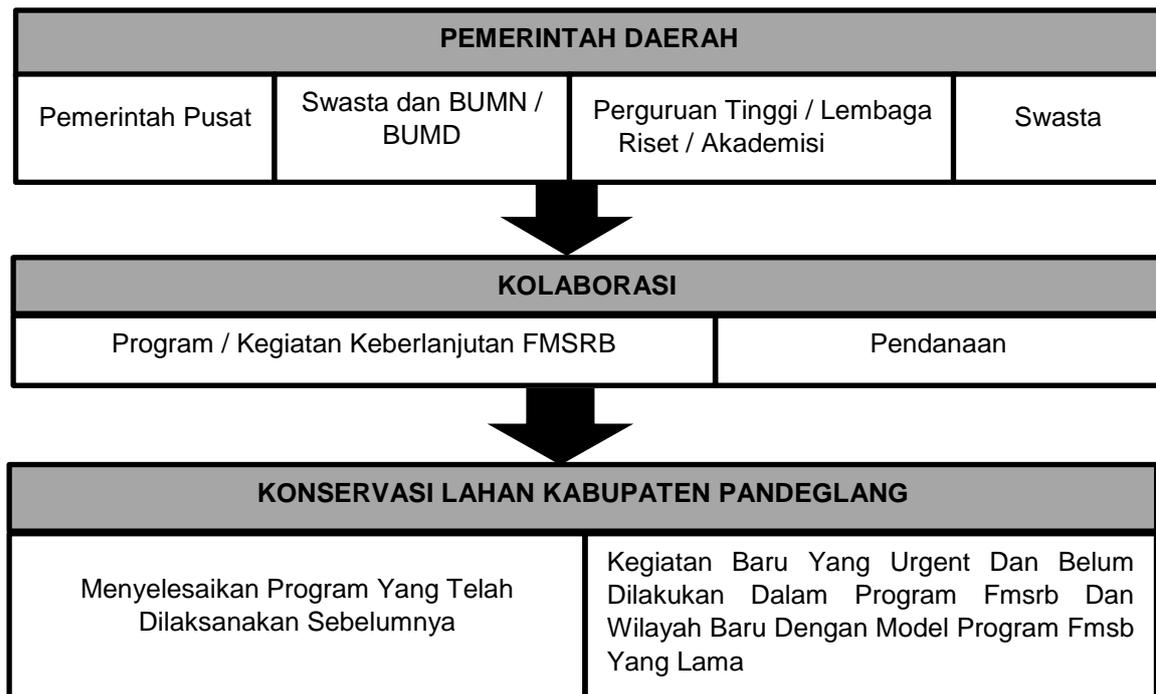
keberlangsungan program adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi untuk pengajuan dan pendanaan program melalui Bappeda Kabupaten Pandeglang/Tim Ajuan Anggaran Daerah (TAPD). Pola kegiatan berbasis pada konsep *Collaborative Governance*. Menjadikan aktor pembangunan bukan hanya mengandalkan pemerintah tapi seluruh *stakeholder* terkait sehingga semua pihak bisa merasakan sebagai subjek dan objek pembangunan (Dewi 2019).

### **Analisis *Stakeholder* dan Keberlangsungan Pendanaan FMSRB**

Berdasarkan analisis *stakeholder* diketahui bahwa *stakeholder* kunci adalah Lembaga donor, Pemerintah RI (Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Karena keberadaan lembaga donor sudah selesai memberikan bantuan pada tahun 2022 ini maka peran utama dalam keberlangsungan program FMSRB sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang diharapkan menjadi aktor utama yang mendorong keberlangsungan kegiatan FMSRB dengan melakukan kemitraan dengan berbagai instansi dan swasta yang masih konsen pada isu konservasi lahan dan dampaknya bagi masyarakat. Tata kelola FMSR ini mengacu pada konsep *Collaborative Governance*.

Pemerintah Pusat melalui kementerian pertanian dan lingkungan hidup dapat melakukan kemitraan dengan sector swasta, BUMN serta NGO untuk melakukan keberlanjutan program FMSRB yang belum diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga dapat melakukan kemitraan dengan sector swasta, BUMN, BUMD agar dapat melakukan kemitraan pendanaan dan program. Pemerintah Daerah juga bisa melibatkan perguruan tinggi dan berbagai lembaga penelitian untuk membantu memberikan pemikiran serta kegiatan pengabdian yang berbasis pada program pengembangan FMSRB. Pemerintah Daerah juga bisa melibatkan media dan NGO untuk memaintenance isu FMSR dan konservasi lahan di wilayah Pandeglang agar berbagai pihak konsen terhadap masalah tersebut. Pola Kolaborasi kemitraan Pemerintah Pusat, Daerah serta berbagai aktor dalam keberlangsungan FMSRB sesuai Gambar 4.

**Gambar 4. Model Keberlangsungan Pendanaan FMSRB**



#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis *stakeholder* ditemukan aktor utama adalah Kelompok tani selaku penerima manfaat, hubungan dan pengaruh sangat kuat karena selaku objek penerima manfaat. Kelompok tani memiliki sumberdaya lahan dan kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan lahan pertanian. Pada kemampuan sumberdaya tersebut, kelompok tani memiliki kepentingan yang besar terkait peningkatan pendapatan. Sisi ini tentu kita bisa maknai positif dan negative. Pada *stakeholder* sekunder adalah Akademisi, Media massa, swasta, konsultan, CF (Fasilitator), Penyuluh (PPL), masyarakat yang terkena dampak secara tidak langsung. Pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori *stakeholder* sekunder ada aktor yang sangat berpengaruh besar dibandingkan aktor lainnya adalah keberadaan aktor swasta. Keberadaan aktor swasta bisa menjadi mitra bagi kelompok tani dan pemerintah dalam melakukan pengembangan program Adapun kelompok yang termasuk dalam *stakeholder* kunci adalah lembaga donor, yaitu *Asian Development Bank* (ADB); kementerian pertanian dan kementerian terkait seperti Lingkungan Hidup; Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

kkhususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas PUPR. Aktor inisiator dan katalisator dalam keberlangsungan program sangat tergantung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, kkhususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2. Pola Keberlangsungan dan Pengembangan FMSRB diharapkan diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dengan melibatkan berbagai instansi serta kelompok masyarakat yang kosen pada pada usaha konservasi lahan konsep *Collaborative Governance* dalam upaya pengentasan banjir seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Petani/Kelompok tani, NGO lingkungan nasional dan local, Pihak swasta, Perguruan tinggi/akademisi.

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang diharapkan menjadi aktor pionir serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti swasta, pemerintah pusat, provinisi, NGO, akademisi, petani/kelompok tani, serta berbagai kalangan dalam upaya melakukan berbagai program keberlanjutan FMSRB yang lebih komprehensif dengan memprioritaskan program yang urgen untuk segera diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. (2006). *Statistika Penerapan Model Rerata Sel Multivariat dan Model Ekonometri dengan SPSS*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Arsyad, S. (2006). *Konservasi Tanah dan air*. Bogor: IPB Press.
- BPS. (2022). *Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Menurut Provinsi (Hektar), 2011-2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brysson, J. M. (2004). *What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder Identification and Analysis Technique*. Meneapolis: Humbert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
- Creswell, J. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damara, R. J. (2017). KONSERVASI LAHAN PERTANIAN DI DESA WONOLELO DAN BANYUROTO KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG. *Geo Educasia*.

- Demircioglu, M., & Audretsch, D. (2017). Conditions for innovation in public sector organizations. *Res Policy*, 1681-1691.
- DPKP. (2022). *“Master KAK FMSRB 2022 - Exit Strategy & Kemandirian Petani Konservasi.”*. Pandeglang: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartley, J. (2014). *“Innovation in Governance and Public Services : Past and Present,”* *Public Money Manag.*, no. February 2005.
- Isna, A. (2013). *Analisis Data Kuantitatif*. Purwokerto: STAIN Press.
- Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kompas.tv. (2020). *“FMSRB: Konservasi Lahan Menuju Daulat Pangan dan Daulat Ekonomi.”*. Jakarta: Kompas.tv.
- Kurnia, U. e. (2011). *Pengelolaan air pada tanah sawah*. Jakarta: Balittanah.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten: CV. AA. RIZKY.
- Miles, M., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (3rd ed)*. California: SAGE Publication, Inc.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Morgan, S. M. (1995). *Engineering Properties of Vegetation. Di Dalam : Slope Stabilization and Erosion Control. A Bioengineering Approach*. London: Imprint of Chapman & Hall.
- Rusdiyana, Nurwahyunani, A., & Marianti, A. (2021). Analisis Peran Petani Dalam Konservasi Lahan Pertanian Berbasis Kearifian Lokal. *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1).
- Singarimbun, M. D. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Slappendel, C. (1996). Perspectives on innovation in organizations. *Organ. Stud*, 107-129.
- Stufflebeam, D. (1967). *D. L. Stufflebeam, The CIPP Model For Evaluation, dalam Evaluation in Education and Human Service*. Boston: D. L. Stufflebeam,

The CIPP Model For Evaluation, dalam Daniel L. Stufflebarger. Kluwer Academic Publisher.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, N., Balitklimat, & Heryani, N. (2014). TEKNOLOGI KONSERVASI TANAH DAN AIR UNTUK MENCEGAH DEGRADASI LAHAN PERTANIAN BERLERENG. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*.

Ulum, W. (2020, Januari 4). *tempo.co*. Retrieved from metro.tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1630183/ratusan-hektare-tanah-negara-di-puncak-terancam-hilang-ptpn-mafia-tanah-bermain>

UNDESA. (2006). *Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works*. New York.

Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisa*. Jakarta: Intermedia.

Wijayanto, H., Wibowo, A., & Anantayu, S. (2021). Perilaku Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Kawasan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Kabupaten Karanganyar. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*.

Winarno, B. (2014). *"Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus."*. Yogyakarta: CAPS.